

TESIS

**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI PROVINSI BENGKULU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S2)
Pada Magister Ilmu Hukum*



Diajukan Oleh:

MARDHATILLAH SUAKA

NIM. 1920112063

Pembimbing:

1. Dr. Mardenis, S.H., M.Si
2. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI PROVINSI BENGKULU

(Mardhatillah Suaka, 1920112063, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 210 Halaman)

ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan penduduk termiskin se-Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas penduduk muslim di Provinsi Bengkulu, sebenarnya memiliki solusi untuk mengatasi dan membantu orang miskin tersebut melalui zakat. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan mencari kejelasan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu. (2) Untuk mengetahui dan mencari kejelasan penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan mencari kejelasan pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan berjenis empiris yuridis dengan cara mewawancarai langsung ke Kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan BAZNAS Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini (1) Pengumpulan zakat harta di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan dengan 3 tahapan. Pertama, tahap perencanaan pengumpulan zakat tidak dilakukan dengan strategi khusus dan tidak terpaku pada jadwal tertentu. Kedua, tahap pengoordinasian pengumpulan zakat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Ketiga, tahap pelaksanaan pengumpulan zakat harta bersumber dari zakat perorangan dan zakat badan usaha. (2) Penyaluran zakat harta di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan dengan 3 tahapan yakni Pertama, tahap perencanaan dengan cara membentuk 6 program kerja. Kedua, tahap pengoordinasian dilakukan dengan cara mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang diikuti BAZNAS dari 9 Kabupaten dan 1 Kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Provinsi Bengkulu. Ketiga, tahap pelaksanaan terbagi menjadi 2 kategori yakni pendistribusian berupa penyaluran zakat bersifat konsumtif dan pendayagunaan berupa penyaluran zakat bersifat produktif. (3) Pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan kepada stafnya, namun tidak ada Dewan Pengawas yang seharusnya mengawasi pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu dan Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Akuntan Publik, dan masyarakat, namun Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan pengawasan.

Kata kunci: Pengelolaan, Pengumpulan, Penyaluran, Pengawasan, BAZNAS Provinsi Bengkulu

**MANAGEMENT AND CONTROL OF ZAKAT AT THE NATIONAL
AMIL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) IN BENGKULU PROVINCE**

(Mardhatillah Suaka, 1920112063, Andalas University Faculty of Law
Postgraduate Program, 2021, 210 Pages)

UNIVERSITAS ANDALAS
ABSTRACT

According to statistics from the federal bureau of statistics 2019, bengkulu province is Indonesia's poorest. Islam, as the majority religion of the Muslim population in the province of bengkulu, actually has the solution to overcome and help the poor through zakat. The research aims (1). To find out and seek clarity in the collection of zakat that BAZNAS province of bengkulu did. (2) to find out and find clarity the distribution of resources made by BAZNAS province of bengkulu. (3) to find out and seek clarity the oversight of the maximum management of zakat BAZNAS province of bengkulu. The research methods used are jurisdictional by conducting a direct interview with the BAZNAS province of bengkulu, bengkulu province administration, the BAZNAS province of bengkulu, and the Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). (1). The collection of zakat at the bengkulu province of baznas is done on three levels of planning, coordination, and administration. The zakat scheme at the baznas province of bengkulu was not executed with a special strategy and was not set on a schedule. The defuneration of zakat collection in the baznas province of bengkulu was carried out directly and indirectly. The plan for the acquisition of property in the baznas province of bengkulu is based on individual zakat and accipation agency.(2). The distribution of resources in the BAZNAS province of Bengkulu is done on three levels of planning, coordination, and administration. The stage of planning by forming the 6 major work programs. The ordinance of reconciliation was held by the BAZNAS of 9 districts and 1 cities and Lembaga Amil Zakat (LAZ) in the province of bengkulu. (3). The control BAZNAS province of bengkuluwas conducted internally and externally. (1) internal surveilliance was made by the head of BAZNAS province bengkulu to his staff, but no board of overseers was supposed to oversee the head of the BAZNAS province of Bengkulu (2). External surveilliance was carried out by the ministry of the religious republic of Indonesia, public accountant, and public, but the bengkulu province government did not give the attention to the BAZNAS province of Bengkulu.

Keywords: *Management, Collection, Distribution, Surveilliance, BAZNAS province of Bengkulu.*